



Buletin Parlementaria

Nomor 1109/IV/VI/2020 • Juni 2020



Timwas DPR Minta Kemenkes Persiapkan *New Normal* dengan Matang



9 772614 339005



3 DPR dan Pemerintah
Komitmen Gotong
Royong Tanggulangi
Covid-19



13 DPR Kembali
Pertanyakan Lonjakan
Tagihan Listrik

Timwas DPR Minta Kemenkes Persiapkan *New Normal* dengan Matang

Ketua Tim Pengawas (Timwas) Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Kesehatan mempersiapkan secara matang pelaksanaan *new normal*. Hal ini diutarakannya saat berkunjung ke Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes) guna melakukan pengawasan terhadap penanganan pandemi Covid-19.

“Ini adalah tugas konstitusional kami dalam mengawasi seluruh pelaksanaan penanganan Covid-19, terlebih soal mekanisme dalam menjalani tatanan hidup baru (*new normal*). Saya minta Kementerian Kesehatan mempersiapkannya dengan matang,” kata Muhaimin saat memimpin rapat kerja Timwas Covid-19 DPR RI dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di Kantor Kemenkes, Jakarta, Rabu (17/6).

Selain mekanisme menghadapi *new normal*, dalam rapat juga berkembang beberapa isu yang salah satunya disampaikan oleh Anggota Timwas Covid-19 DPR RI Dewi Asmara. Ia menanyakan terkait penggunaan anggaran Kemenkes yang naik menjadi Rp 87,55 triliun dari sebelumnya Rp 75 triliun.

“Pemerintah menambah anggaran Kemenkes dalam penanggulangan Covid-19 mencapai Rp 87,55 triliun. Bagaimana dengan insentif tenaga kesehatan? Karena di media, diulas bahwa insentif belum didistribusikan. Kami mohon Pemerintah memberi perhatian kepada tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan,” kata Dewi.

Terkait penerapan *new normal*, legislator Fraksi Partai Golkar itu memahami langkah Pemerintah yang

membuka sektor ekonomi dengan protokol Covid-19 yang kuat. Namun, karena masih tingginya kasus Covid-19, Dewi meminta peran Kemenkes ditingkatkan lagi.

“Kami memahami langkah Pemerintah memberlakukan *new normal* karena ekonomi harus bergerak. Tapi, hingga hari ini kasus Covid-19 belum turun dan ada kekhawatiran gelombang kedua. Peran Kemenkes adalah kunci dari kesuksesan pertumbuhan ekonomi yang akan dilakukan Pemerintah. Kami minta keseriusan Kemenkes, karena di sini keberhasilan pertumbuhan ekonomi ada pada kewaspadaan Kemenkes,” tuturnya.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyampaikan situasi Covid-19 saat ini, sampai tanggal 16 Juni terkonfirmasi kasus mencapai 40.400. Presentasi kasus sembuh 38,87 persen dan *Case Fatality Rate* (CFR) atau

tingkat kematian karena virus Corona mencapai 5,52 persen.

Menkes menjelaskan, terkait tes PCR, yang pertama diminta Pemerintah adalah 10 ribu dan bisa tercapai. Kemudian Pemerintah menargetkan menjadi 20 ribu saat ini. “Kami masih dalam tahap mencapai target ini. Saat ini sudah mencapai 15 ribu per minggu, semoga percepatan ini bisa berlangsung dengan baik. Mekanisme PCR terus kami perbaiki,” katanya.

Turut hadir dalam kunjungan kerja Anggota DPR RI yang tergabung dalam Timwas Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 DPR RI antara lain Diah Pitaloka (F-PDIP), Dewi Asmara (F-Golkar), Hamka (F-Gerindra), Lisda Hendra Joni (F-Nasdem), Marwan Dasopang (F-PKB), Nanang Samudro (F-Partai Demokrat), Nur Azizah Tahmid (F-PKS), Sungkono (F-PAN) dan Nurhayati (F-PPP). ■ rnm/es



Ketua Timwas Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar usai memimpin rapat kerja Timwas Covid-19 DPR RI dengan Menkes Terawan Agus Putranto di Jakarta. Foto: Azka/MAN

DPR dan Pemerintah Komitmen Gotong Royong Tanggulangi Covid-19



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. Foto: Azka/MAN

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengatakan Pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2019-2020 ini, bertepatan dengan tahapan *New Normal* yang disiapkan Pemerintah dalam rangka penanganan Covid-19. Untuk itu, DPR RI memiliki komitmen yang tinggi untuk ikut bergotong royong bersama Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat dalam menanggulangi pandemi Covid-19.

Dalam pidatonya, Puan meminta Pemerintah memastikan berbagai protokol kesehatan Covid-19 semua lini ketika memasuki tahapan *new normal*. Seperti protokol di pasar, sekolah, rumah sakit, tempat kerja, terminal, dan tempat-tempat kerumunan lainnya.

“Pemerintah perlu sosialisasi dengan baik sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Apalagi, saat ini pasar sudah menjadi salah satu tempat penyebaran Covid-19, padahal pasar sebagai tempat

ekonomi masyarakat bergerak dan sebagai fungsi kontrol stabilitas harga pangan,” kata Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).

Politisi PDI Perjuangan itu menyampaikan, DPR RI melalui Tim Pengawas (Timwas) Penanggulangan Bencana Covid-19 akan melakukan pengawasan atas pelaksanaan alokasi anggaran dan program penanganan Covid-19, termasuk mencermati efektivitas realokasi dan *refocusing* anggaran Covid-19 yang dilakukan di kementerian/ lembaga terkait.

Fungsi pengawasan DPR RI juga akan diarahkan pada upaya pemulihan sosial dan ekonomi yang akan dilakukan oleh Pemerintah, seperti pemulihan di bidang pendidikan dengan sistem pembelajaran jarak jauh, pemulihan pariwisata, pemulihan ekonomi nasional dan sebagainya.

Selain itu, lanjut Puan, DPR RI akan memberikan perhatian pada tahapan persiapan Pilkada 2020. “Setiap tahapan Pilkada diharapkan dapat menyesuaikan dengan mekanisme pemilihan dan protokol kesehatan Covid-19. Pemerintah dan pihak penyelenggara perlu mempersiapkan hal ini sebaik-baiknya sehingga Pilkada dapat dilaksanakan sesuai rencana, yaitu tanggal 9 Desember 2020,” paparnya.

Selain itu, pihaknya mengapresiasi yang tinggi kepada dokter, tenaga kesehatan, TNI dan Polri, yang berada di depan dalam melayani masyarakat terdampak baik dari aspek penanganan kesehatan maupun dalam membangun ketertiban PSBB. “Keberhasilan dalam menanggulangi Covid-19 adalah keberhasilan dari gotong royong kita, bangsa Indonesia,” pungkasnya. ■ rnm/es



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Hasri Mentari

ANGGOTA REDAKSI

Rizka Arinindy, S.Sos, Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Natasya Amanda P, S.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Irandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Pumtho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbari, Siti Nadiah, Riyan Hidayat, Nafisa Hanum Alaydrus, Larissa Amanda Indianti, Mohammad Rizki Nugraha.

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moerpoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie.

ANALIS MEDIA

Deprisa Citra Akbari, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widoyawati

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natallio, Fajar Suryanto

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Sartomo, S.S., M.Si (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah, Fathurahman

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

FOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Siti Nur Aidah S.A.P., M.AP, Sugiyanto, S.E, Yudi Kresna

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana Puspita

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Pimpinan DPR Sarankan Pembukaan Sekolah Ditunda

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan

(Korekku) Sufmi Dasco Ahmad menilai pembukaan kembali sekolah saat pandemi virus Corona (Covid-19) masih berisiko. Walaupun sekolah berada di zona hijau, namun menurut Dasco, banyak hal yang harus dipersiapkan dengan matang, diantaranya kesiapan infrastruktur penunjang penerapan protokol kesehatan dan sumber dayanya.

“Menurut saya, masih terlalu berisiko untuk membuka kembali sekolah walaupun ada di zona hijau, karena bagaimanapun anak-anak sekolah ini sangat rentan,” kata Dasco kepada awak media di selasar Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6). Pernyataan ini disampaikan Dasco menanggapi rencana pembukaan tahun ajaran baru dan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah oleh Pemerintah.

Politisi Partai Gerindra itu menuturkan, anak-anak sekolah masih rentan dihadapkan situasi pandemi Covid-19. Tak ada yang menjamin murid dapat diawasi dan dihindarkan dari penularan Covid-19. Karena itu, ia menyarankan KBM tetap digelar secara daring. Hal ini, lanjutnya, untuk kepentingan keselamatan bersama.

“Dengan anggaran yang terbatas di masing-masing sekolah untuk penyiapan infrastruktur dan lain-lain, karena itu menurut saya (penyelenggaraan KBM) tetap harus ditunda dulu. Izin dari orang tua memang diperlukan, tetapi ketika murid di lingkungan sekolah itu kan sudah bukan tanggung jawab orang tua. Jadi, jangan kita terlalu spekulasi untuk anak sekolah, saya sarankan ditunda dulu,”



Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Sofyan/MAN

pesan legislator dapil Banten III itu.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri mengumumkan tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Covid-19.

Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan kegiatan belajar dengan tatap muka langsung di sekolah hanya boleh digelar di daerah berstatus zona hijau mulai Tahun Ajaran Baru pada Juli dan dilakukan secara bertahap. Selain itu, keputusan pembukaan sekolah harus ditetapkan pemerintah daerah setempat.

“Untuk saat ini, karena hanya 6 persen zona hijau, hanya merekalah yang dipersilahkan mengambil keputusan untuk melakukan sekolah dengan tatap muka,” kata Nadiem saat mengumumkan secara daring, Senin (15/6/2020). Pemerintah juga memberikan syarat bagi sekolah yang berada di zona hijau untuk kembali menggelar pembelajaran tatap muka, salah satunya adalah mendapatkan izin dari orang tua murid.

Nadiem menyampaikan, pembukaan sekolah dilakukan terlebih dulu untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat. Sementara, untuk jenjang Sekolah dasar (SD) belum boleh membuka sekolah, hingga dua bulan setelah pembukaan SMP dan SMA. ■ ann/sf

Pelaku Usaha Harus Beradaptasi dengan Pandemi

Di masa pandemi Covid-19 dan situasi belum stabil dalam penyesuaian tatanan kehidupan baru (*new normal*) berlangsung, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyarankan agar kalangan dunia usaha harus memanfaatkan aktivitas sebaik mungkin dengan mengikuti protokol kesehatan. Menurutnya, hal ini tidak mudah dan berisiko tinggi, namun tidak ada pilihan lain, agar kegiatan ekonomi tidak mandek dan krisis berkepanjangan.

“Mau tidak mau, pelaku usaha harus beradaptasi dengan cara berpikir kreatif, dan berani melakukan *shifting* pola kerja baru di lingkup industri, maupun ruang publik,” papar Rachmat saat memberikan Pengantar Seminar Live by InCore-Tax Maksi Trisakti, di Jakarta, baru-baru ini.

Wakil Ketua Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) ini memaparkan, saat ini telah terjadi revolusi pasar yang signifikan, karena respon konsumen terhadap

”

PELAKU USAHA HARUS BERADAPTASI DENGAN CARA BERPIKIR KREATIF, DAN BERANI MELAKUKAN SHIFTING POLA KERJA BARU DI LINGKUP INDUSTRI, MAUPUN RUANG PUBLIK

produk dan perdagangan, serta edukasi, telah berubah drastis. Dengan demikian pelaku usaha, eksekutif, dan legislatif, harus mencari solusi di era perubahan tersebut.

“*National interest* harus menjadi kata kunci bagi semua pihak dalam memanfaatkan momentum besar menuju negara industri maju, berprestasi dan daya tahan tinggi menghadapi

krisis,” tandas politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu.

Pandemi dalam waktu singkat mengubah perilaku konsumen dari transaksi konvensional ke pola dalam jaringan (*online*). Rantai pasok berubah, kontak fisik antara produsen dan konsumen makin minim, tuntutan harga jual kian kompetitif, dan sistem transaksi pembayaran dituntut semakin ideal.

“Sudah saatnya para pelaku usaha, pemerintah, dan politikus mengubah *mindset*. Langkah sistematis harus dibangun, mulai dari evaluasi gaya kepemimpinan yang ada, hingga penguasaan pasar,” pungkash legislator dapil Gorontalo itu. ■ *eko/es*



Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel.
Foto: Jaka/MAAN



Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menerima audiensi HAPSI di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta. Foto: Azka/MAN

Audiensi dengan HAPSI, Azis Syamsuddin Bahas Dunia Perfilman Indonesia

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menerima audiensi Himpunan Artis dan Pengusaha Seluruh Indonesia (HAPSI) di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, baru-baru ini. Pertemuan dengan menerapkan protokol kesehatan tersebut banyak membahas perkembangan dunia perfilman Indonesia saat ini.

Azis menyampaikan bahwa HAPSI perlu dilibatkan penuh dalam rangka mengembangkan dunia perfilman Indonesia menjadi lebih baik. Melihat lesunya sektor industri kesenian bahkan sebelum pandemi Covid-19 datang, menurut Azis memang dibutuhkan para pemerhati dunia seni untuk dapat memberikan terobosan besar untuk mengembalikan popularitas perfilman Indonesia.

“Kami mendengar masukan-masukan dari HAPSI dan mereka juga menyampaikan aspirasi agar dalam kegiatan-kegiatan DPR yang membahas sektor industri kesenian untuk mereka dapat berperan atau dilibatkan, sehingga HAPSI dapat memberi saran kepada pemerintah maupun parlemen. Saya harapkan nanti ini bisa berjalan,” aku Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu usai pertemuan.

Menurut politisi Partai Golkar itu, dunia perfilman Indonesia saat ini selalu dikuasai oleh produk-produk luar negeri, padahal kualitas produk perfilman Indonesia juga tidak kalah bagus. Menurutnya perlu ada bentuk wadah apresiasi khusus yang perlu dibangkitkan, sehingga dapat memacu industri perfilman Indonesia agar tetap eksis dan berkembang.

Untuk itu menurut Azis, HAPSI juga perlu mengembangkan strategi serta memperbaiki batang tubuh struktur mereka terlebih dahulu. Legislator dapil Lampung II ini pun berharap HAPSI bisa menjadi contoh yang baik bagi para pekerja seni di Indonesia untuk lebih semangat mendukung kualitas dunia perfilman Indonesia.

“HAPSI meminta dukungan politik kepada DPR dalam rangka bagaimana ke depan HAPSI dapat berkembang. Dan tentu berkembangnya ini perlu bimbingan, kemudian program-program yang baik dari Pemerintah dan DPR, menurut mereka juga sangat menentukan. Nanti dalam beberapa kesempatan kita coba lihat dimana letak HAPSI yang bisa dilibatkan,” kata Azis menutup wawancara dengan **Parlementaria**. ■ er/sf

Peremajaan Alutsista TNI Perlu Dipercepat

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai peremajaan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI harus menjadi perhatian serius Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Hal itu sehubungan dengan jatuhnya helikopter Mi-17 milik TNI AD di Kendal, Jawa Tengah dan pesawat tempur milik TNI AU berjenis BAE Hawk 209 di Kampar, Riau yang hanya berselang dalam waktu singkat.

Menurutnya, peremajaan sangat penting dan perlu dipercepat mengingat alutsista TNI saat ini banyak yang bermasalah karena sudah berumur. “Kita harus akui ada alutsista kita yang berusia sudah tua meskipun masih dinyatakan layak terbang, apalagi hanya untuk latihan misalnya,” kata Sukamta di Jakarta, Selasa (16/6).

Ia mengatakan pesawat milik TNI sudah beberapa kali jatuh, seperti pada tahun 2016 pesawat Tucano jatuh di Malang, kemudian akhir 2016 pesawat Hercules C-130 jatuh di Wamena. Kemudian, pada awal Juni 2020, helikopter TNI AD jatuh di Kendal menewaskan 4 orang di tempat dan 1 orang setelah menjalani perawatan intensif.

Menurutnya, peristiwa beruntun itu mencerminkan kondisi kelayakan alutsista Indonesia.

“Oleh karena itu, evaluasi rutin harus terus dilakukan. Mungkin kita perlu buat standar baru yang tinggi atas kondisi kelayakan terbang pesawat TNI,” ujar Politisi F-PKS ini. Dia menilai standar kelayakan yang ada sekarang harus dibuat lebih ketat lagi sehingga pesawat yang selama ini masih dikatakan layak terbang oleh standar lama, bisa jadi sudah tidak layak terbang menurut standar baru nanti.

“Jadi hanya pesawat yang tergolong baru saja yang layak diterbangkan. Ini lebih baik untuk keselamatan kita semua,” jelasnya. Sukamta mengatakan standar kelayakan alutsista TNI juga terkait marwah pertahanan Indonesia di hadapan dunia internasional. Lebih lanjut ia mengatakan tahun 2020 bertepatan dengan mulai masuknya pada tahap ke-4 Kekuatan Pokok Minimum (MEF) yaitu tahun 2020-2024, berbagai kejadian tersebut bisa menjadi momentum untuk terus mengevaluasi dan memperkuat alutsista Indonesia.

Politisi dapil DI Yogyakarta ini mendorong agar industri pertahanan Indonesia lebih ditingkatkan, karena negeri ini mempunyai PT. Dirgantara Indonesia yang bisa memproduksi pesawat, bahkan produknya sudah diekspor ke beberapa negara. “Semoga ke depan kita bisa memenuhi sendiri kebutuhan alutsista dalam negeri secara dominan dan minim impor alutsista, sehingga kebutuhan anggarannya bisa ditekan dan dioptimalkan untuk dapat spesifikasi yang tinggi,” pungkasnya.

■ ann/sf

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta. Foto: Oji/MAN



Arif Wibowo Pertanyakan Penanggung Jawab Pengadaan APD Pilkada



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo. Foto: Runi/MAN

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo meminta kepastian siapa pihak yang akan berwenang dan diberikan kuasa tanggungjawab dalam pengadaan alat perlindungan diri (APD) yang akan diterapkan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Hal ini perlu dipastikan untuk menghindari berbagai permasalahan yang muncul kedepannya.

“Sesungguhnya APD ini mau dianggarkan dan diadakan sendiri oleh penyelenggara, difasilitasi oleh pemerintah atau difasilitasi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Hal ini saya kira perlu dipastikan. Karena kalau tidak karut

marut di dalam alokasi anggaran pasti akan terjadi,” kata Arif dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat virtual Komisi II dengan Menkeu, Mendagri, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, KPU, Bawaslu dan DKPP baru-baru ini.

Arif mengatakan, fokus Komisi II DPR RI sebelumnya yaitu menekankan kepada penyelenggara agar tidak mengurus urusan yang sesungguhnya bukan menjadi urusannya. “Supaya penyelenggara bisa lebih pas di dalam menghadapi Covid-19 ini dalam kaitan dengan penyelenggaraan tahapan Pilkada lanjutan,” tuturnya.

Dikatakannya, akan ada banyak perubahan penyelenggaraan tahapan Pilkada lanjutan, seperti soal strategi,

mekanisme, kebijakan, program dan lain sebagainya. “Dan dalam waktu yang tidak terlalu panjang, kurang lebih 6 bulan efektif, penyelenggara itu fokusnya pada pelaksanaan tahapan Pilkada lanjutan agar kualitas demokrasinya tidak terdegradasi atau semakin menurun,” ungkap politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.

Oleh karenanya, Arif menegaskan agar persoalan anggaran tambahan bagi pengadaan kebutuhan peralatan pendukung standar protokol kesehatan Covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 bisa dipastikan, akan diadakan atau diberikan kewenangan kepada siapa, dilaksanakan oleh siapa, dan dalam tanggungjawab siapa.

“Kita harus pastikan siapa yang memberikan dan memfasilitasi APD tersebut. Karena akan terkait juga dengan penghitungan anggaran tambahan yang dibutuhkan, baik yang diambilkan dari optimalisasi APBD maupun yang bisa dibantu oleh APBN,” terangnya.

Ia menyampaikan, dibutuhkan data yang detail terkait dengan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada sehubungan dengan merebaknya covid-19 ini. “Menurut saya, soal anggaran itu relatif, sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang KPU mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 4,7 triliun dan itu sudah mencukupi dengan ukuran-ukuran yang standar kualitasnya tetap terjaga, KPU bisa melaksanakan Pilkada yang aman di mata masyarakat, maka pemerintah seharusnya memikirkan betul agar bisa terpenuhinya anggaran tambahan yang diperlukan dan diajukan oleh KPU itu,” tutup Arif. ■ dep/es

Penanganan Kasus Novel Baswedan Jadi Citra Buruk Penegakan Hukum

Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Al Habsyi menanggapi polemik tentang tuntutan jaksa yang hanya satu tahun untuk penyerang penyidik KPK Novel Baswedan, dengan alasan tidak sengaja melukai mata. Menurutnya ini sangat mengoyak rasa keadilan masyarakat, seolah tindakan para penyerang Novel ini dapat dimaklumi dengan alasan ketidaksengajaan.

“Inilah yang terlihat mengoyak rasa keadilan masyarakat. Perkara yang sedang menjadi perhatian publik seperti ini seharusnya ditangani dengan baik,” papar Habib dalam keterangan persnya, baru-baru ini.

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ini menegaskan, bahwa Kejaksaan seharusnya menyiapkan rencana penuntutan yang baik, jangan sampai seolah publik melihat ini hanya sebuah drama. Menurutnya hal tersebut tidak baik untuk citra penegakan hukum di Indonesia.

“Jamwas dan Jaksa Agung perlu memberikan atensi pada kasus ini. Publik berhak tahu kenapa tuntutan kepada pelaku penyerangan penegak hukum bisa seperti itu. Jangan sampai nanti menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia,” jelas Habib.

Anggota Komisi III DPR RI
Habib Aboe Bakar Al Habsyi.
Foto: AndOji/MAN

”

INILAH YANG TERLIHAT MENGOKYAK RASA KEADILAN MASYARAKAT. PERKARA YANG SEDANG MENJADI PERHATIAN PUBLIK SEPERTI INI SEHARUSNYA DITANGANI DENGAN BAIK

Dia menjelaskan, bahwa dalam teori ilmu hukum pidana dikatakan ‘tiada pidana tanpa kesalahan’ (*geen straf zonder schuld*). Kesalahan, di sini dapat berupa dua dimensi faset, yakni pidana kesalahan akibat ‘kesengajaan, (dolus) dan pidana kesalahan akibat ‘kelalaian’. Jadi jika dikatakan tindakan penyiraman ini tak sengaja, seolah ingin menghilangkan unsur dolus dalam pidana.

Menurut Politisi dari Fraksi PKS ini, seharusnya yang menjadi unsur penentu di sini adalah faktor niat batin (*mens rea*) dari para pelaku. Apa memang ada penyiraman air keras dilakukan dengan tanpa sengaja.

“Inikan bahasa sangat sederhana, masak ada istilah ‘menyiram’ tanpa sengaja. Para pelaku yang membawa air keras, pada suatu subuh dengan menarget Novel, adalah indikasi kuat *mens rea* mereka. Bahwa secara sadar mereka melakukan perbuatan penyerangan terhadap Novel dengan alat air keras,” ujar Habib. ■ eko/es



Pertanian Jadi Sektor Terbesar yang Terdampak Pandemi

Anggota Komisi IV DPR RI Charles Meikyansah menilai salah satu sektor yang sangat terdampak pandemi Covid-19 dan perlu mendapatkan perhatian pemerintah adalah sektor pertanian. Sektor ini merupakan yang terbesar dan berpengaruh terhadap hajat hidup masyarakat.

“Pada masa pandemi Covid-19 terjadi penurunan kesejahteraan petani, yang dapat dilihat berdasarkan data Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) yang mengalami penurunan. Penurunan NTP sebesar 102,09 atau turun 1,22 persen dibandingkan dengan NTP bulan sebelumnya,” jelas Charles dalam pesan singkatnya kepada **Parlementaria**, Rabu (17/6)

Ditambahkan Charles, penurunan NTP terjadi karena adanya penurunan indeks harga yang diterima petani (It) yaitu sebesar 1,08 persen, sedangkan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) naik sebesar 0,14 persen. Data NTUP pada Maret 2020 menunjukkan adanya penurunan sebesar 102,90 atau turun 1,18 persen dibandingkan dengan NTUP bulan sebelumnya.

Berkaca pada data tersebut, lanjutnya, Pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan petani dengan cara melakukan intervensi kebijakan yang berpihak kepada petani. Penurunan NTP dan NTUP berdampak tidak baik terhadap petani, khususnya di tengah perlambatan ekonomi di tengah pandemi saat ini.

Dalam kondisi krisis seperti sekarang ini, menurut Charles

diperlukan keberpihakan terhadap kelompok rentan. Meningkatkan sebagian besar dari penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani. Data dari *Food Agricultural and Organization* (FAO) tahun 2018 menunjukkan bahwa 93 persen mayoritas petani Indonesia adalah petani kecil (*smallholder farmers*).

“Hingga saat ini masih terdapat 88 kabupaten/kota rentan pangan, sebagaimana dilansir oleh *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) pada tahun 2018 lalu. Sebagian besar daerah rentan pangan tersebut terletak di wilayah timur Indonesia. Masalah ini semakin serius dengan adanya pandemi Covid-19 yang mengancam perekonomian dunia, termasuk Indonesia,” jelas Politisi dari Fraksi Nasdem ini.

Sehingga, langkah strategis harus segera dilakukan untuk memastikan daerah-daerah rawan pangan bisa melewati masa pandemi ini dengan keadaan yang baik, tanpa adanya permasalahan di sektor pangan. Untuk itu, produksi pertanian untuk mencukupi kebutuhan di daerah-daerah rentan pangan. Tentu jalur distribusi (*supply-chain*) dipastikan agar tidak ada kendala dalam distribusi kebutuhan pangan.

“Kebijakan yang tepat di sektor pertanian sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, misalnya dengan cara pembelian alat dan mesin pertanian (Alsintan) yang kemudian berdampak terhadap produksi yang meningkat. Keberhasilan Kementerian Pertanian dalam menjaga performa baiknya sangat berpengaruh terhadap ekonomi nasional,” pungkasnya.



Anggota Komisi IV DPR RI Charles Meikyansah. Foto: Runi/MAN

■ ayu/es

Pemerintah Wajib Hati-hati Terapkan Skema Tapera



Anggota Komisi V DPR RI Rifqinizamy Karsayuda. Foto: Runi/MAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusi mewajibkan negara menghadirkan tempat tinggal bagi warga negara, terlebih bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Gotong royong dibutuhkan dalam melaksanakan kewajiban konstitusional ini. Anggota Komisi V DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai, Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) adalah satu ikhtiar membangun solidaritas tersebut.

Kendati demikian, momentum pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera diterbitkan pada masa yang kurang tepat di masa seluruh elemen bangsa Indonesia menghadapi pandemi Covid-19. Meski, masa pemberlakuan iuran Tapera bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) baru diberlakukan 1 Januari 2021 yang akan datang. Serta, masih ada waktu maksimal 7 tahun bagi mereka

yang bekerja di sektor swasta untuk memenuhi kewajiban pembayaran iuran Tapera ini.

“Saya mengingatkan, kewajiban tentang pelaksanaan dan penyelenggaraan Tapera merupakan amanah dari UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera. persoalannya adalah, ketentuan lebih lanjut dari UU ini baru diterbitkan 4 tahun kemudian yaitu di tahun 2020 ini melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020,” ujar Rifqi, sapaan akrabnya dalam keterangan resminya yang disampaikan kepada **Parlementaria**, Sabtu (13/6).

Politisi PDI-Perjuangan ini menyatakan, dasar berpikir hadirnya ketentuan tentang Tapera paling tidak ada dua hal. Pertama, Tapera adalah implementasi asas gotong royong, saling membantu, solidaritas sebagai sebuah bangsa. Mereka yang mempunyai memberikan subsidi atau bantuan kepada mereka yang belum mempunyai dalam rangka pemenuhan

hak-hak mereka untuk mendapatkan perumahan.

Pada pihak lain, sambung Rifqi, negara dengan segala macam ikhtiarnya harus membuktikan bahwa kebutuhan dasar (*basic need*) berupa sandang, pangan dan papan, dalam konteks Tapera adalah kebutuhan papan bisa dipenuhi oleh negara dengan berbagai skema. Untuk itu, tandasnya, Tapera yang diatur dalam PP 25 Tahun 2020 sebetulnya ingin memastikan dua hal itu.

Lebih lanjut, Rifqi menegaskan DPR RI tak akan tinggal diam jika ada indikasi terlebih bukti penyelewengan dana Tapera. Legislatur dapil Kalimantan Selatan I itu mengingatkan sejak dini kepada semua pihak terutama Badan Pengelola (BP) Tapera agar tak bermain-main dengan dana Tapera. Termasuk, jika menginvestasikannya melalui media yang sangat *high risk* dan dapat merugikan rakyat.

Maka, Rifqi mengingatkan pentingnya penataan data guna mengefektifkan dana Tapera. Untuk itu, Rifqi menginginkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai *leading sector* dari perumahan rakyat harus memiliki data yang solid terkait ASN, TNI, Polri, Karyawan BUMN dan BUMD atau mereka yang penghasilannya dikutip melalui program Tapera.

“Ke depan, dengan data itu, subsidi APBN bagi perumahan subsidi bisa perlahan dikurangi. Tapera akan menjadi *sharing* dana dengan subsidi yang diberikan melalui APBN, baik melalui skema FLPP, selisih suku bunga (SSB) dan melalui skema-skema yang lain. Pada titik tertentu bahkan subsidi APBN kedepan hanya fokus kepada masyarakat kita yang belum ter-cover Tapera,” pungkasnya. ■ pun/sf

Menteri BUMN Diminta Bubarkan BUMN yang Tak Menguntungkan

Anggota Komisi VI DPR RI Mukhtarudin mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil Menteri BUMN Erick Thohir dalam konteks perbaikan, yakni langkah restrukturisasi maupun perombakan manajemen di dalam tubuh BUMN yang muaranya adalah dalam rangka efektivitas dan efisiensi pada BUMN agar semakin baik dan menguntungkan.

“Kita juga meminta kepada Menteri BUMN untuk melakukan tindakan-tindakan yang barangkali menurut undang-undang dimungkinkan untuk melakukan perombakan atau pembubaran BUMN yang kita anggap tidak menguntungkan lagi,” ucap Mukhtarudin dalam Rapat Kerja Virtual Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN, baru-baru ini.

Dikatakannya, kalau memang secara Undang-Undang yang ada saat ini tidak dimungkinkan untuk dilakukan pembubaran atas BUMN yang tidak menguntungkan itu, maka perlu ada tindak lanjut pembicaraan mengenai ini. Hal ini menyangkut adanya beberapa Undang-Undang BUMN yang sekarang masuk dalam Prolegnas.

“Jangan sampai nanti Menteri BUMN susah untuk memperbaiki sesuatu yang seharusnya dipangkas karena hambatan struktural secara Undang-Undang. Oleh karena itu hal ini menjadi perhatian kita juga,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Seperti yang disampaikan Menteri BUMN, sambung Mukhtarudin, hampir 90 persen sektor usaha terdampak Covid-19. Sehingga ini menjadi fakta yang ada dan tidak mungkin dipungkiri



Anggota Komisi VI DPR RI Mukhtarudin. Foto: Andri/MAN

bahwa Covid-19 sudah meluluhlantakan sendi-sendi kehidupan dunia termasuk Indonesia, sehingga membuat ekonomi hampir lumpuh.

“Beruntung pada kuartal pertama (ekonomi) kita masih tumbuh 2,97 persen. Dalam kondisi Covid-19 dimana dunia sudah terkoreksi minus, kita masih bertahan pada 2,97 persen pada kuartal pertama. Dengan kondisi yang sangat berat mungkin kita akan terkoreksi di nol koma sekian. Kalau pun berat diusahakan berada tetap di angka dua koma sekian. Ini optimisme yang harus kita bangun dalam rangka menjaga ekonomi kita,” kata Mukhtarudin.

Ia mengatakan, BUMN sebagai salah satu motor penggerak ekonomi, memang harus menjadi perhatian khusus. 90 persen terdampak dan 10 persen yang masih eksisting seperti sektor kesehatan dan pangan. Menurutnya, ini menjadi catatan

penting dan berharga bagi pemerintah, bagaimana agar Kementerian BUMN kedepan lebih memperkuat posisi portofolio daripada BUMN Farmasi dan BUMN Pangan.

Tidak menutup kemungkinan virus seperti ini akan terjadi lagi, lanjutnya. Tidak mungkin virus ini berhenti di Covid-19, mungkin saja akan muncul Covid-Covid yang lain. Meskipun saat ini tengah menurun, tetapi dia (Covid-19) akan bermutasi lagi menjadi virus baru yang dahsyat, dan seterusnya dunia berkembang seperti itu.

“Oleh karena itu jika hal ini terjadi lagi seperti ini, tentu kita sudah mempunyai manajemen krisis dan sudah paham bagaimana menyikapinya. Oleh sebab itu BUMN Pangan dan BUMN Farmasi kita ke depan harus betul-betul kita benahi sehingga mampu dan tidak kelabakan seperti yang lalu,” tandasnya. ■ dep/es

DPR Kembali Pertanyakan Lonjakan Tagihan Listrik

Komisi VII DPR RI kembali mempertanyakan atas lonjakan tagihan listrik beberapa bulan terakhir kepada Dirut PT. PLN (Persero). Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PLN, Rabu (17/6) Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita menyampaikan, lonjakan tagihan listrik ini sangat merugikan masyarakat.

“Isu yang tengah marak diperbincangkan masyarakat dan juga disampaikan kepada kami, Anggota Komisi VII, yakni terkait melonjaknya tagihan listrik. Ini telah merugikan masyarakat setidaknya dari psikologis dan ekonomis. Sempat diungkapkan oleh Pak Rudy (Anggota Komisi VII), ada yang bunuh diri karena tidak bisa membayar tagihan listrik. Menurut kami ini masalah yang sangat serius, karena PLN satu-satunya badan usaha yang ditunjuk oleh pemerintah dalam memberikan layanan listrik ke seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Ratna.

Mungkin yang lebih ditekankan di sini, lanjut Ratna, masyarakat hari ini sebagai satu-satunya penanggung beban yang disampaikan oleh PLN. Selama ini PLN telah mendefinisikan problem tersebut secara sepihak, dan masyarakat dipaksa untuk menerima definisi tersebut.

Padahal sebagaimana yang dijelaskan oleh Dirut PLN sebelumnya, permasalahan tersebut timbul karena penyesuaian skema operasional PLN untuk menghadapi pandemi Covid-19. Jika sebelumnya pencatatan meteran dilakukan setiap bulannya dari rumah ke rumah, namun sejak berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), skema pencatatan meteran tersebut tidak dapat dilakukan lagi.

“Namun sejatinya PSBB ini bukan kebijakan yang bisa ditanggung masyarakat. Seharusnya saat skema operasional itu terjadi perubahan, PLN seharusnya sudah menyampaikan dan menyosialisasikan ke masyarakat. Sehingga sebelum perubahan skema

operasional itu terjadi, masyarakat sudah mengetahuinya terlebih dahulu dan siap mengantisipasinya,” ungkap Ratna.

Ratna sejatinya mengapresiasi beberapa solusi yang diberikan PLN terkait hal ini. Diantaranya penambahan *call center*, skema cicilan, inovasi teknologi terkait pencatatan penggunaan daya listrik secara pribadi. Namun permasalahannya dengan masyarakat saat ini menurut Ratna belum sepenuhnya *clear*. Masyarakat belum melihat, melonjaknya tagihan listrik itu benar-benar akibat dari pemakaiannya sendiri. Bahkan ada masyarakat yang mengatakan, kantornya sudah tutup sejak awal tahun lalu tapi tagihan listrik malah melonjak saat PSBB.

Politisi Fraksi PKB ini juga mengatakan, selain komunikasi yang baik, cobalah melihat bahwa PLN butuh masyarakat, dan masyarakat menjadi mitra penting PLN dalam skema dagang, walaupun saat ini masyarakat mau tidak mau harus menerima PLN. Namun posisikan diri PLN itu juga membutuhkan masyarakat dan harus melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.

“Saya prihatin, PLN ini seperti dibiarkan berjuang sendiri oleh Pemerintah. Padahal yang sangat terdampak akibat PSBB ini adalah PLN. Kerugian PLN akibat menurunnya sektor industri hampir Rp 9,1 triliun per bulan. Apa yang sudah dilakukan Pemerintah untuk pemulihan akibat pandemi Covid-19 ini? Meski pemerintah telah menyiapkan dana sekitar Rp 677 triliun, namun apakah PLN juga menerima bagian dari dana yang disiapkan pemerintah untuk pemulihan akibat dampak Covid-19 ini,” pungkasnya. ■ ayu/es



Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita. Foto: Azka/MAN

Perbaiki DTKS Harus Segera Dilakukan

Anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka menilai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki Pemerintah Indonesia masih belum efektif. Palsanya masih banyak masyarakat kurang mampu tidak terdaftar secara tepat dan benar, sehingga tidak menerima bantuan sosial dari Pemerintah. Karenanya, menurut politisi PDI-Perjuangan itu, perbaikan DTKS harus segera dilakukan.

“Di dalam DTKS itu kan ada tiga klaster data, ada penerima PKH, penerima BPNT, serta yang belum menerima bantuan. Dan di situ terdapat juga penerima yang tidak menerima, tetapi tercatat menerima. Jadi ini kan tidak jelas,” kata Diah seolah bertanya saat mengikuti RDP Komisi VIII DPR RI dengan Bupati Bekasi, Bupati Tangerang, Wali Kota Serang, dan Wali Kota Bogor di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6).

Diah mengatakan saat pandemi virus Covid-19 terjadi di Indonesia banyak masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin melebar. Data DTKS sangat diperlukan untuk mendata setiap masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), sehingga dibutuhkan validitas data secara tepat.

“Saat ini banyak masyarakat terkena PHK dan membutuhkan

”

SAAT INI BANYAK MASYARAKAT TERKENA PHK DAN MEMBUTUHKAN BANTUAN SOSIAL, TETAPI MASIH BANYAK YANG TIDAK TEPAT SASARAN KARENA PERMASALAHAN DATA INI TIDAK JELAS DAN TIDAK AKURAT

Anggota Komisi VIII DPR RI
Diah Pitaloka. Foto: Oji/IAN



bantuan sosial, tetapi masih banyak yang tidak tepat sasaran karena permasalahan data ini tidak jelas dan tidak akurat. Yang seharusnya mendapatkan bansos malah tidak justru sebaliknya,” imbuh Diah sembari menyampaikan saat ini persoalan kevalidan DTKS menjadi fokus utama Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah agar segera menyesuaikannya secara baik dan benar.

“Persoalan DTKS ini hanya di Jawa dan sekitarnya saja, tetapi di Papua kita masih belum tahu. Penyelesaiannya ini harus pelan-pelan, agar hasilnya maksimal. Kita harus undang dulu seluruh pimpinan-pimpinan daerah agar kita mengetahui juga tentang kevalidan DTKS tersebut,” tandas legislator dapil Jawa Barat III itu. ■ tn/sf

Tidak Tepat Naikkan Iuran BPJS Kesehatan saat Pandemi Covid-19

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menilai, keputusan pemerintah yang kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan di tengah pandemi Covid-19 tidaklah tepat.

“Kalau mau bicara kenaikan iuran, tunggu kita stabil. Saat ini kita bicara ekonomi, tata kelola, tapi kita lupa urusan sosialnya seperti bagaimana dampak dari pandemi ini,” ungkapnya saat rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan, Menko PMK, Kepala DJSN, Dirut BPJS Kesehatan, Dewas BPJS Kesehatan, baru-baru ini.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Ia mengatakan banyak masyarakat yang kondisi ekonominya sulit saat Covid-19 ini merebak di Indonesia. “DPR menolak kenaikan iuran BPJS. Ini legislatif diabaikan. Karena itu saya minta penghitungan aktuariannya seperti apa, biar kita lihat dulu. Jangan-jangan ini asal-asalan juga kenaikannya,” tegasnya.

Politisi Fraksi PAN ini berharap putusan MA dilaksanakan oleh pemerintah. Namun yang terjadi justru sebaliknya, pemerintah malah mengabaikannya. “Makanya mohon maaf, seakan-akan kita dikerjain semua sama pemerintah. Ada sebuah lembaga institusi demokrasi di Indonesia yang dilangkahi oleh pemerintah. Coba lihat itu MA kan adalah suatu lembaga yang disebut dengan yudikatif. Keputusannya diabaikan oleh pemerintah,” ucapnya keheranan.



Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene. Foto: Jaka/MAN

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, saat ini tarif iuran BPJS Kesehatan masih jauh dari perhitungan aktuarial. Padahal, pemerintah telah menaikkan tarif iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri melalui Perpres Nomor 64 tahun 2020.

Muhadjir mengatakan dengan tarif iuran yang berlaku saat ini, pemerintah harus menambal selisihnya dengan besaran iuran berdasarkan perhitungan aktuarial. Namun demikian, hal tersebut tidak bisa berlangsung secara terus menerus jika disesuaikan dengan kapasitas fiskal pemerintah.

“Bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) itu, iya. Kalau di bawah aktuarial, artinya

pemerintah yang menanganinya. Tapi tentu tidak mungkin pemerintah akan terbebani terus menerus dengan kapasitas fiskal yang ada. Idealnya, ini iuran gotong royong, sehingga ditanggung bersama secara aktuarial ini. Bukan berarti pemerintah tidak bertanggung jawab,” tukasnya

Sebagaimana diketahui, kenaikan iuran BPJS Kesehatan berlaku mulai 1 Juli 2020 setelah pemerintah mengeluarkan Perpres 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Sedangkan untuk peserta kelas III, kenaikannya berlaku mulai 2021. Padahal MA sebelumnya telah membatalkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020 yang diatur dalam Perpres 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

■ rmm/es

Belajar Mengajar di Sekolah Sebaiknya Ditunda

Panduan pembelajaran selama Covid-19 perlu ditinjau kembali. Menurut panduan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) hanya daerah dengan zona hijau yang dibolehkan melaksanakan belajar tatap muka, yaitu 6 persen atau sekitar 85 kabupaten/kota zona hijau se-Indonesia. Menurut Anggota Komisi X DPR RI Ali Zamroni, sebaiknya kegiatan belajar mengajar di sekolah ditunda saja.

“Sebaiknya dilakukan penundaan kegiatan belajar mengajar di sekolah apabila saat ini hanya ada 6 persen saja sekolah yang berada di zona hijau. Kebijakan tersebut akan membuat masyarakat gusar dan bertanya-tanya mengenai jaminan keamanan jangka panjang bagi siswa dan guru,” kata Ali dalam siaran persnya yang diterima *Parlementaria*, Rabu (17/6).

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu berpendapat, banyak yang harus diatur kembali secara rinci apabila kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka akan dilakukan. Misalnya, soal koordinasi dan sosialisasi Kemendikbud kepada Pemerintah Daerah yang berada di zona hijau. Ia tak menginginkan, KBM itu membuat situasi panik karena ketidaksiapan para orang tua murid.

Persoalan urgen lain yang harus diperhatikan ialah anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan KBM tatap muka. Apakah Pemda sudah merancang kesiapan anggaran untuk memfasilitasinya. Dari data panduan Kemendikbud, terhitung hanya 6 persen wilayah Indonesia atau sekitar 85 kabupaten/kota yang masuk zona hijau. Lalu, bagaimana dengan 94

persen atau 492 kabupaten/kota yang masih kuning, oranye, atau merah.

“Jika Pemerintah hanya memperhatikan kondisi belajar bagi zona aman, padahal itu hanya sedikit dari sekian banyak sekolah yang tak membuka aktivitas belajar tatap muka, lantas bagaimana nasib para siswa yang daerahnya masih dalam dalam zona awas,” tutur Ali bertanya-tanya. Sekolah-sekolah yang berada di zona hijau, menurut Ali, belum tentu siap menggelar KBM tatap muka.

Apalagi, sambung legislator dapil Banten I itu, sekolah-sekolah di zona hijau rata-rata bukan di daerah perkotaan. Artinya, sekolah itu tidak memiliki sarana dan akses kesehatan yang memadai. Ditambahkannya,

penundaan bisa dilakukan dengan catatan Kemendikbud harus mereview sistem pembelajaran daring yang sudah berjalan selama ini. Kemendikbud harus lebih memperhatikan kebutuhan siswa dalam fasilitas Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

“Pemerataan akses teknologi PJJ yang tidak sama antara satu daerah dengan daerah lainnya harus dicarikan jalan keluar. Di Lebak Selatan, misalnya, untuk akses internet bagi pelajar masih sangat sulit aksesnya. Siswa kurang mampu harus diberikan kuota/paket data agar tetap ikut KBM secara daring. Materi pembelajaran juga harus lebih dirancang dengan efektif dan tidak membebani siswa,” tulis Ali dalam rilisnya. ■ mh/sf



Anggota Komisi X DPR RI Ali Zamroni. Foto: Jaka/MAN

Waspadai Pelebaran Defisit, Jaga Kesenambungan Fiskal



Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo. Foto: Arief/MAN

Tahun ini, kondisi makro ekonomi Indonesia sedang mengalami guncangan hebat akibat pandemi Covid-19. Koreksi atas target makro ekonomi pun tak terelakkan sehingga terbit Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang sudah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo menyampaikan sejumlah pandangannya. Pertama, meningkatnya belanja negara untuk penanganan Covid-19 membuat pelebaran defisit menjadi tak terelakkan. Sejak awal disusun, defisit APBN hanya ditargetkan sebesar Rp 307,2 triliun (1,76 persen PDB) atau tidak melebihi 3 persen PDB agar sesuai dengan amanat UU 17/2003 tentang Keuangan Negara. Namun akibat pandemi, UU 2/2020 mengizinkan defisit di atas 3 persen PDB sampai dengan tahun 2022. Akibatnya, defisit dikoreksi menjadi Rp 852,9 triliun (5,07 persen PDB) sesuai Perpres 54/2020. Sekarang, berdasarkan *outlook*, defisit APBN diperkirakan akan menyentuh angka Rp

1.039,2 triliun (6,34 persen PDB).

“Demi menjaga kredibilitas dan akuntabilitas, Pemerintah perlu menghitung secara cermat proyeksi kebutuhan biaya dan potensi pendapatan, sehingga tidak terlalu sering mengubah Perpres. Di samping itu, pemerintah perlu menyusun kembali strategi komprehensif menuju defisit di bawah 3 persen pada tahun 2023. Upaya ini harus dilakukan dengan perhitungan yang cermat, penuh kehati-hatian, disiplin tinggi, dan kredibel sehingga menjamin kesinambungan fiskal dalam jangka menengah maupun jangka panjang,” kata Andreas dalam siaran pers tertulis yang diterima *Parlementaria*, Minggu (14/6/2020).

Selanjutnya, pelebaran defisit yang berimbas pada penambahan utang dan bunga utang akan mengancam kesinambungan fiskal sehingga hal ini perlu dicermati dan diantisipasi. Kebijakan fiskal yang tidak berkesinambungan berimplikasi langsung pada *country risk* Indonesia. Andreas menilai peningkatan *country risk* berpotensi menurunkan peringkat investasi yang selama ini sudah berangsur membaik.

Tentu saja, kondisi ini dapat menghambat investasi yang akan masuk ke Indonesia, sehingga berpotensi mengancam target-target pembangunan jangka panjang yang sudah ditetapkan.

“Oleh karena itu, pemerintah perlu mempersiapkan amunisi yang meyakinkan, yaitu kebijakan fiskal yang berkesinambungan yang dapat menjaga stabilitas makroekonomi. Salah satu aspek penting adalah kinerja penerimaan negara yang mumpuni, khususnya pajak. Kondisi tahun ini sangat berat sehingga penerimaan pajak sangat tertekan, apalagi demi mengatasi dampak pandemi dan pemulihan ekonomi nasional telah digelontorkan insentif pajak sejumlah Rp 123,01 triliun,” papar politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Selain itu, Anggota Badan Legislasi DPR RI ini juga mewanti-wanti bahwa sinyal perlambatan penerimaan pajak yang di tumbuh melambat -3,09 persen (yoy) di April harus diwaspadai. Ada risiko *shortfall* pajak yang bisa mencapai Rp 388 triliun atau bahkan lebih. Tanpa kalkulasi cermat dengan risiko melebarnya *shortfall* yang sangat terbuka, maka akan memperlebar defisit dan menambah beban utang,” paparnya.

“Kami mendorong segera disusun skenario konsolidasi fiskal yang solid dengan target defisit yang terukur menjadi di bawah 3 persen pada tahun 2023 dan *outlook* penerimaan pajak yang realistis dan menjanjikan. Langkah-langkah konkret untuk optimalisasi penerimaan pajak harus segera diambil, antara lain implementasi penggunaan NIK dalam setiap transaksi untuk ekstensifikasi basis pajak dan efektivitas pemungutan PPN, penerapan metode yang lebih sederhana agar pemungutan PPN lebih efektif, pemanfaatan data dan informasi perpajakan yang lebih optimal dan transparan, dan penegakan hukum yang berkeadilan,” pungkasnya. ■ alw/sf

Kemudahan Berusaha Adalah Roh RUU Ciptaker

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sarmuji menegaskan bahwa kemudahan berusaha adalah roh dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang kini tengah dibahas Baleg dan Pemerintah. Namun, ada berupa titik tekan terkait dengan penentuan kriteria terhadap sertifikasi produk halal. Hal inilah yang membuat Baleg turut mengundang MUI, PBNU dan Muhammadiyah guna mencari masukan tentang hal-hal yang berkaitan dengan sertifikasi produk halal.

“Kita perlu untuk mengakomodasi dua hal. Pertama, kemudahan berusaha yang menjadi titik tekan di RUU Ciptaker ini. Dan dalam RUU ini tampak sekali kemudahan berusaha menjadi semacam roh dari RUU ini. Kedua, ada satu hal yang harus diakomodasi adalah jaminan produk halal, ini berkaitan rasa aman dan rasa nyaman bagi kaum muslim terhadap produk yang dikonsumsi,” ujar Sarmuji saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg dengan MUI, PBNU dan Muhammadiyah, Kamis (11/6).

Usai mendapatkan paparan dari ketiga narasumber tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI itu memberikan apresiasi dan memperoleh masukan yang konstruktif terkait produk halal. Seperti masukan terkait dengan kriteria-kriteria yang harus diputuskan terkait penerbitan sertifikasi produk halal.

“Ada masukan yang bagus seperti kita perlu menyusun seperti kriteria untuk mendetailkan seperti apa agar produk itu bisa dinyatakan produk halal. Dan ada dua masukan secara berbeda. Ada yang meminta tetap MUI untuk menentukan kriteria-kriterianya. Dan ada usul bahwa kriteria-kriteria produk

”

TERHADAP MASUKAN-MASUKAN TERSEBUT, AKAN MENJADI CATATAN BAGI BALEG DALAM PEMBAHASAN DI PANJA, NAMUN TERKAIT DENGAN LEMBAGA YANG BERWENANG MENENTUKAN KRITERIA PRODUK HALAL INI PERLU ADA PENDALAMAN LEBIH LANJUT

halal itu bisa dilakukan oleh lembaga keagamaan yang saat ini diakui di Indonesia,” jelas Sarmuji.

Terhadap masukan-masukan tersebut, akan menjadi catatan bagi Baleg dalam pembahasan di Panja. Namun, terkait dengan lembaga yang berwenang menentukan kriteria produk halal ini perlu ada pendalaman lebih lanjut. Tetapi secara prinsip, politisi Partai Golkar itu memastikan hal-hal yang akan diatur dalam RUU Ciptaker ini seyogyanya akan memberikan kemudahan berusaha bagi masyarakat.

■ hs/sf

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sarmuji. Foto: Oji/MAN



Aneksasi Israel Dikhawatirkan Picu Perang Terbuka



Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon. Foto: Andri/IMAN

su konflik Palestina-Israel kembali memanas. Pasca kesepakatan koalisi Benjamin Netanyahu dan Jenderal Benny Gantz terbentuk, Israel berencana aneksasi sebagian wilayah Palestina di Tepi Barat. Komunitas internasional mengecam langkah tersebut, termasuk Otoritas Palestina (PA) dan Hamas. Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mewanti-wanti sejumlah dampak akibat rencana teranyar aneksasi Israel atas Tepi Barat itu.

“Dampak mengerikan dari rencana aneksasi itu adalah meletusnya perang terbuka Palestina-Israel secara masif, solusi dua negara akan seperti ilusi, dan stabilitas kawasan dan global terancam. Terlebih, saat dunia menghadapi pandemi. Akar masalahnya, karena Israel tak mau tunduk terhadap norma dan hukum internasional manapun.

Termasuk, Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 242 yang menyerukan Israel menarik diri dari wilayah-wilayah yang diduduki dalam Perang enam hari tahun 1967,” papar Fadli dalam rilisnya, Kamis (11/6).

Lebih lanjut, Anggota Komisi I DPR RI ini mendesak PBB, OKI, dan masyarakat internasional lainnya segera mengambil langkah yang diperlukan. “Saya mendesak masyarakat dunia terutama PBB dan OKI segera bertindak. Saya juga meminta Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa OKI yang diselenggarakan secara daring baru-baru ini benar-benar menghasilkan langkah-langkah konkret untuk mencegah aneksasi Israel itu. Boikot Israel dan mengisolasinya dari pergaulan internasional bisa menjadi pilihan,” tegas Fadli.

Langkah aneksasi ilegal tersebut, sambung Fadli, lantaran Israel meyakini

tidak akan ada sanksi apapun atas langkahnya itu termasuk dari Dewan Keamanan PBB. “Lebih dari tujuh dekade, Israel kerap melanggar norma dan hukum internasional. Mereka tak jera karena tak ada sanksi konkret apapun. Apalagi sekarang dunia sibuk dengan pandemi Corona. Kita perlu dorong pihak Palestina menempuh langkah yang membuat Israel jera. Saya mendukung ancaman Otoritas Palestina yang akan menarik diri dari kesepakatan Oslo dan mendeklarasikan kemerdekaan Palestina secara sepihak,” saran Fadli.

Pada sisi lain, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Periode 2014-2019 itu memuji inisiatif pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh, yang secara khusus mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Hamas meminta Presiden Jokowi mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah aneksasi Tepi Barat oleh Israel.

“Presiden Jokowi harus merespon permintaan khusus tersebut. Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia secara moralitas selayaknya terdepan dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina,” desak Fadli yang juga Wakil Presiden the League of Parliamentarians for Al-Quds, sebuah forum parlemen global yang mendukung perjuangan Palestina.

Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut menekankan bahwa respon Presiden Jokowi atas permintaan Hamas tersebut merupakan mandat konstitusi. “Sangat jelas dukung Hamas yang berjuang membebaskan Palestina selaras dengan konstitusi kita yang menolak keras segala bentuk penjajahan,” imbuh Fadli. ■ ann/sf

BAKN Undang Pakar Bahas Kebijakan Subsidi di Indonesia

Di Indonesia, kebijakan subsidi merupakan instrumen kebijakan fiskal dalam rangka menjaga pemerataan terhadap akses ekonomi dan pembangunan. Subsidi diperuntukkan untuk melakukan koreksi terhadap ketidaksempurnaan pasar.

Subsidi energi di Indonesia dalam satu dekade terakhir mencapai angka lebih dari seratus triliun rupiah setiap tahunnya. Bahkan, pada tahun 2014 angka subsidi energi mencapai angka Rp 246,5 triliun atau 2,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Atau, setara dengan belanja di lebih 5 kementerian lembaga.

Guna mendapatkan masukan terkait subsidi energi dan melihat lebih

jauh efektifitas kebijakan dan metode pemberian subsidi energi yang diterapkan oleh pemerintah, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum dengan beberapa pakar dan narasumber.

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Syaikhul mengemukakan, kebijakan subsidi haruslah tepat sasaran. Manfaat subsidi energi mesti bisa dirasakan oleh kelompok masyarakat miskin di Indonesia.

“Pada prakteknya, terjadi anomali dan disorientasi sasaran pada kebijakan subsidi di Indonesia, yang justru keluar dari konteks proteksi terhadap kelompok masyarakat miskin. Manfaatnya jatuh pada kelompok yang

tidak semestinya,” ucap Ahmad Syaikhul di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6).

Meskipun di satu sisi subsidi dipandang sebagai bantuan sosial, tambah Syaikhul, namun kebanyakan subsidi energi Indonesia lebih bersifat regresif. Dengan kata lain hanya menguntungkan kelompok berpendapatan tinggi secara tidak proporsional, sebagai akibat dari subsidi tidak tepat sasaran yang tidak menjangkau kalangan miskin.

“Pada saat yang sama, mekanisme harga tetap juga mendorong konsumsi energi yang boros dan sia-sia. Dimana, hanya memberikan sedikit insentif untuk meningkatkan efisiensi energi atau mengurangi emisi gas rumah kaca domestik. Dan berkontribusi pula terhadap memburuknya neraca perdagangan Indonesia,” ujarnya.

Menanggapi pertanyaan tertulis dari Anggota Dewan tentang dampak subsidi energi terhadap kesejahteraan rakyat, Enny Sri Hartati selaku salah seorang pakar yang diundang hadir dalam RDPU tersebut menyampaikan bahwa kebijakan energi tidak hanya soal harga murah. Namun, juga harus menuju kemandirian energi. Enny juga mendorong adanya bauran energi dalam rangka meningkatkan penggunaan energi terbarukan.

“Kebijakan subsidi mestinya diperuntukkan dan dinikmati oleh kelompok masyarakat miskin. Akan tetapi subsidi energi di Indonesia saat ini masih belum tepat sasaran. Karena, porsi terbesarnya justru dinikmati oleh orang kaya. Selain itu, skema subsidi yang ada di Indonesia justru berpotensi dimanfaatkan para pemburu rente ekonomi atau sering disebut mafia,” tutur Enny. ■ dep/es



Wakil Ketua BAKN DPR RI Ahmad Syaikhul. Foto: Andri/MAN

Penundaan Pembahasan RUU HIP Diapresiasi

Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya secara resmi menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Penundaan itu sangat diapresiasi, lantaran banyak penolakan dan kritik tajam atas RUU yang sebetulnya diinisiasi F-PDI Perjuangan DPR RI itu.

Dalam keterangan persnya, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, gelombang kritik dan penolakan terdengar sangat nyaring. Ia memuji langkah Mahfud MD yang menghentikan pembahasan karena respon negatif masyarakat. “Sikap yang paling bijak dalam merespon suara-

suara masyarakat tersebut adalah menghentikan atau menunda pembahasannya,” kata Saleh.

Fraksi PAN DPR RI sendiri menyambut baik sikap Pemerintah yang sangat tanggap dan cepat dalam menyahuti isu yang berkembang di masyarakat. Berkenaan dengan itu, sudah selanjutnya Parlemen menindaklanjutinya. Artinya, pembahasan RUU HIP itu memang sudah tidak bisa dilanjutkan. “Pak Mahfud menyebut Pemerintah

meminta menunda pembahasan. Itu kan bahasa halus. Sama saja, Pemerintah meminta agar pembahasan dihentikan. Apalagi, Pemerintah menyebut mau fokus mengurus penanganan Covid-19,” ungkap Saleh.

Menurut Anggota Komisi IX DPR RI itu, pembuatan UU akan berjalan baik jika ada kesepakatan antara Pemerintah dan DPR RI. Jika sejak awal sudah ada satu pihak yang meminta ditunda, berarti pembahasannya tidak akan berjalan mulus. Perlu penyamaan persepsi dan pandangan lagi.

Tentu ini butuh waktu.

Yang jelas, Fraksi PAN mendukung pernyataan Pak Mahfud. Semoga ini didengar oleh semua Fraksi,” harapnya. ■ mh/sf



Wakil Ketua MKD DPR RI
Saleh Partaonan Daulay.
Foto: Arief/MAN

Kantor Sekretariat KORPRI DPR Diresmikan

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar meresmikan Kantor Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Sekretariat Jenderal DPR RI baru yang berposisi di kawasan lapangan jantung sehat, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/6). Peresmian kantor baru ini bertujuan untuk menunjang pelayanan anggota KORPRI Setjen DPR RI yang terdiri dari seluruh ASN di lingkungan Setjen DPR RI.

Indra menyampaikan bahwa dengan diresmikannya kantor baru ini, Sekretariat KORPRI dapat bekerja lebih fokus memberikan pelayanan dan membantu memfasilitasi berbagai kegiatan seluruh Anggota KORPRI Setjen DPR RI. Sehingga, para anggota dapat merasakan eksistensi dari adanya KORPRI Setjen DPR RI.

“Perlu ada terobosan-terobosan baru dari pengurus KORPRI Setjen DPR untuk memberikan komunikasi dan informasi kepada anggota. Supaya, semua anggota di sini merasa bahwa eksistensi KORPRI ini memang bagian dari kegiatan sehari-hari,” ujar Indra usai memimpin peresmian kantor KORPRI.

Selanjutnya, Indra meminta para pengurus KORPRI fokus untuk menyelenggarakan musyawarah yang salah satu agendanya adalah mengganti kepengurusan KORPRI yang akan diselenggarakan pada September 2020 mendatang. Menurutnya, ini sangat diperlukan sebagai bentuk penyegaran perma kepengurusan untuk dapat melayani anggota dengan lebih baik.

“Penyegaran itu bukan hanya dari kepengurusan, tetapi juga program-program KORPRI yang selama ini sudah baik masih perlu kita tingkatkan.

Kita berharap, musyawarah bisa diselenggarakan lewat pertemuan fisik. Tentunya mengikuti aturan protokol kesehatan Covid-19 karena pertemuan menyangkut pemilihan ini jika dilakukan secara virtual saya melihat tingkat gregetnya akan berbeda,” imbuh Indra.

Sementara itu, Ketua KORPRI Indra Pahlevi mengaku bersyukur atas diresmikannya kantor baru Sekretariat KORPRI. Serta, berharap kantor baru ini dapat memberi inspirasi dan semangat pada pengurus KORPRI untuk bekerja lebih giat. Menurutnya, selama ini para pengurus telah bekerja maksimal sehingga perlu diapresiasi.

“Jadi, tentu itu yang kita harapkan dengan adanya kantor baru ini. Tentu, stafnya dapat lebih rajin, lebih giat, dan harus lebih *commit* untuk mengembangkan dan membantu bagaimana program kegiatan KORPRI

bisa berjalan,” terang Indra Pahlevi yang juga Kepala Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Indra Pahlevi menjelaskan, bahwa pengurus KORPRI Setjen DPR RI akan terus selalu berpegang pada tujuan pembentukannya. Yaitu, untuk mensejahterakan dan memfasilitasi para anggotanya. “Dalam berbagai hal seperti kegiatan sosial, keagamaan, juga olahraga dan kesenian akan kita fasilitasi. Karena, KORPRI juga mendapat iuran dari para anggotanya,” tambah Indra Pahlevi.

Dalam peresmian tersebut juga diselenggarakan berbagai kegiatan lainnya yang diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan DPR RI Seperti jalan santai, sarapan bersama, dan kegiatan bermusik yang seluruhnya dilaksanakan mengikuti aturan protokol kesehatan Covid-19. ■ *er/sf*



Sekjen DPR RI Indra Iskandar meresmikan Kantor Sekretariat KORPRI Setjen DPR RI. Foto: Jaka/MAN

Pimpinan DPR Serahkan Ventilator ke Yankes



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani di dampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan bantuan Ventilator ke Unit Yankes Sekretariat Jenderal DPR RI. Foto: Gerald/MAN

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani meninjau sarana dan fasilitas kesehatan di Unit Layanan Kesehatan (Yankes) Sekretariat Jenderal DPR RI, Selasa (16/6). Tidak hanya melihat dan memastikan kelengkapan alat kesehatan, Puan yang didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga menyerahkan alat bantu pernapasan atau ventilator sebagai fasilitas penunjang dalam memerangi pandemi Covid-19.

“Untuk menunjang berbagai kegiatan, DPR RI tentu saja membutuhkan setiap anggota, staf, dan pegawainya untuk tetap sehat. Di tengah pandemi seperti sekarang ini tentu dibutuhkan kelengkapan alat-alat kesehatan untuk menangani Covid-19, atau sebagai protokol kesehatan Covid-19. Kita sudah membentuk tim Satgas Covid-19 dan hari ini kami

datang ke sini untuk memberikan 2 ventilator kepada Klinik Yankes ini,” kata Puan dalam keterangan kepada media, sesaat sebelum menyerahkan ventilator.

Meski demikian, politisi PDI-Perjuangan ini tidak berharap alat tersebut pada akhirnya digunakan, atau dirinya berharap agar jangan sampai ada pasien di lingkungan Setjen DPR RI terjangkit Covid-19. “Namun, jikalau memang ada yang membutuhkan alat bantu pernapasan ini bisa menggunakan yang sudah diserahkan tersebut. Semua pihak diharapkan bisa menjaga sebaik-baiknya karena dalam kondisi seperti saat ini, masih akan sangat sulit untuk mendapatkan ventilator seperti yang diharapkan,” imbuhnya.

Selaku Pimpinan Dewan, Puan juga mengingatkan kepada petugas kesehatan untuk selalu menjaga

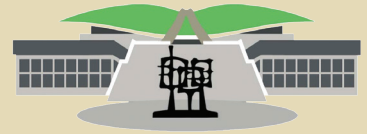
protokol waspada Covid-19. Ia juga mewanti-wanti agar jangan sampai pihak medis mengabaikan hal-hal kecil. Seperti terus-menerus memakai APD, menjaga jarak atau *physical distancing*, memakai masker, sering mencuci tangan dengan sabun, dan terus melakukan penyemprotan disinfektan pada setiap ruangan.

Menutup pernyataannya, Puan juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh tenaga medis yang telah bekerja dengan baik, mulai dari dokter, perawat, staf, dan semua pihak yang selalu bertugas melayani Anggota DPR RI dan pegawai di lingkungan Setjen DPR RI secara umum. Secara langsung, kedua ventilator diserahkan Pimpinan DPR kepada Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan dr. Dian Handayani selaku Kepala Bagian Yankes.

Menerima bantuan tersebut, Kepala Bagian Yankes dr. Dian Handayani mengatakan penggunaan alat bantu pernapasan atau ventilator sering kali dibutuhkan oleh pasien yang mengalami sesak napas. “Jadi dengan alat ini (ventilator) kita bisa monitor kondisi pasien,” kata dr Dian sembari mengatakan, kebutuhan ventilator di unit Yankes DPR RI cukup urgen, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini.

Sehingga adanya bantuan 2 unit ventilator *portable* tersebut dapat diharapkan bisa lebih sigap melayani pasien di lingkungan Setjen DPR RI. “Klinik Yankes melayani Anggota DPR dan pegawai di Setjen, tetapi kalau untuk kondisi *emergency* siapapun yang ada disini akan dilayani untuk pertolongan pertama. Misalnya, tamu sakit bisa diobati disini namun jika perlu penanganan lebih lanjut akan kita rujuk ke RS terdekat,” pungkas dr. Dian.

■ alw,ann/sf



Rapat Paripurna beragendakan Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN TA 202 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis. (18/6). Foto: Azka,Arief/MAN



Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel berdiskusi dengan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro di Kantor Kemenristek, Jakarta, baru-baru ini. Foto: Ist/Man



Setjen DPR RI bersama Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta melakukan penyemprotan disinfektan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (14/6). Foto: Andri/Man

